



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jilak>Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>DOI: <https://doi.org/10.69714/mwj8vb63>

Pengaruh SAP dan PI Terhadap AKIP dengan Tingkat Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Rahmi Juanda ^{a*}, Lilis Marlina ^b

^a Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; rahmijuanda021120@gmail.com, Universitas Teuku Umar, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

^b Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; lilismarlina@utu.ac.id, Universitas Teuku Umar, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

* Penulis Korespondensi: Rahmi Juanda

ABSTRACT

This study examines the effect of Government Accounting Standards and Internal Control on the Performance Accountability of Government Institutions, with religiosity as a moderating variable in the Regional Government of West Aceh Regency. This quantitative study employed an associative approach. The population comprised 30 Regional Government Work Units (SKPK), with 60 respondents selected through purposive sampling, consisting of financial management personnel and structural officials. Data were collected using questionnaires and analyzed through multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that Government Accounting Standards and Internal Control have a positive and significant effect on the Performance Accountability of Government Institutions, both partially and simultaneously. Religiosity also significantly moderates the relationship between Government Accounting Standards and performance accountability, as well as between Internal Control and performance accountability. These findings indicate that stronger implementation of Government Accounting Standards and Internal Control, supported by higher religiosity among government officials, enhances the performance accountability of government institutions.

Keywords: Government Accounting Standards; Internal Control; Religiosity; Government Performance Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Tingkat Religiusitas sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian terdiri atas 30 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan sampel 60 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling, meliputi aparatur pengelola keuangan dan pejabat struktural. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, baik secara parsial maupun simultan. Tingkat religiusitas juga terbukti memoderasi hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal yang didukung oleh religiusitas aparatur dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan; Pengendalian Internal; Religiusitas; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat melalui penyajian informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya[1]. Di Indonesia, implementasi akuntabilitas diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Meskipun demikian, implementasi akuntabilitas kinerja di berbagai pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Tahun 2023, masih menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya penyusunan laporan kinerja, lemahnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta belum maksimalnya fungsi pengawasan internal. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas informasi kinerja dan efektivitas pertanggungjawaban publik sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi akuntabilitas kinerja adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga mendukung akuntabilitas instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi.

Selain SAP, pengendalian internal juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset, menjamin keandalan informasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan[2]. Penelitian [3] menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini juga memasukkan tingkat religiusitas sebagai variabel moderasi. Religiusitas diyakini mampu membentuk nilai moral, integritas, dan tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berada di Provinsi Aceh dengan karakteristik masyarakat yang religius, religiusitas diperkirakan dapat memperkuat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada Agency Theory yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi pada hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut serta menguji apakah religiusitas mampu memperkuat hubungan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Agency Theory

Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan antara principal dan agent, di mana pemerintah sebagai agent bertanggung jawab mengelola sumber daya publik atas mandat masyarakat sebagai principal. Dalam hubungan tersebut dapat terjadi information asymmetry yang memicu konflik kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel melalui sistem pelaporan kinerja, seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP bertujuan meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan lebih andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.3. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk melindungi aset, menjamin keandalan informasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu meminimalkan penyimpangan serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

2.4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program kepada masyarakat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. AKIP menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

2.5. Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama yang tercermin dalam keyakinan, ibadah, serta perilaku individu[4]. Dalam organisasi sektor publik, religiusitas dipandang mampu memperkuat integritas, kejujuran, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugasnya.

2.6. Hipotesis

H1: Pengaruh SAP Terhadap AKIP

Standar Akuntansi Pemerintahan bertindak sebagai kompas yuridis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan birokrasi, baik pada tingkat makro (pusat) maupun mikro (daerah), demi mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban publik. Studi empiris oleh [5] mengonfirmasi bahwa penerapan SAP memiliki kontribusi positif namun tidak berpengaruh signifikan dalam memengaruhi derajat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kacamata Agency Theory, pemerintah daerah berposisi sebagai agen yang memikul tanggung jawab legalitas untuk mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan serta capaian kinerja kepada publik selaku prinsipal. Internalisasi SAP memitigasi distorsi asimetri informasi antara birokrasi dan konstituen lewat penyajian laporan finansial yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Transparansi finansial yang distandardisasi oleh SAP memudahkan pengawasan publik terhadap kinerja aparatur, sehingga dihipotesiskan bahwa semakin optimal implementasi SAP, maka akan semakin eskalatif pula tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H1: SAP berpengaruh positif terhadap AKIP

H2: Pengaruh PI Terhadap AKIP

Pengendalian internal diartikan sebagai regulasi sistemik, prosedur teknis, dan instrumen pengawasan yang dikonstruksikan untuk mengelola risiko organisasi, mengamankan aset, mengeskalasi validitas informasi, serta menjamin kepatuhan operasional[1]. Hasil riset yang dipublikasikan oleh [3] mengindikasikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan postulat Agency Theory, aparatur pemerintah selaku agen berkewajiban mengeksekusi program kerja dan mengelola keuangan publik secara optimal untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku prinsipal. Sistem pengendalian internal berperan sebagai benteng pengawasan yang meminimalkan fraud, inefisiensi, dan asimetri informasi. Pengendalian internal yang kokoh memastikan aktivitas organisasi berjalan on the track sesuai regulasi, sehingga semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka akan semakin tinggi derajat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2: PI berpengaruh positif terhadap AKIP

H3: Pengaruh SAP dan PI Terhadap AKIP

Kajian ilmiah oleh [6] membuktikan bahwa secara simultan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal memberikan dampak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan perolehan nilai signifikansi sebesar 0,200 (yang nampaknya memerlukan re-evaluasi matematis terhadap batas kritis 0,05). Penyelarasan kedua instrumen ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketika regulasi SAP dijalankan secara beriringan dengan sistem pengawasan internal yang andal, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih akurat, deviasi anggaran dapat ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi daerah akan meningkat secara simultan.

H3: SAP dan PI berpengaruh positif terhadap AKIP

H4: Religiusitas Memoderasi Hubungan Antara SAP dengan AKIP

Penelitian [7] membuktikan bahwa tingkat religiusitas bertindak sebagai variabel pemoderasi yang memengaruhi interaksi antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui pendekatan Agency Theory, komitmen aparatur (agen) dalam mengimplementasikan prinsip SAP akan semakin diperkuat apabila mereka memiliki integritas moral keagamaan yang tinggi. Pejabat publik yang religius cenderung menjunjung tinggi kejujuran dan disiplin aturan, sehingga pelaksanaan standar akuntansi bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum, melainkan tanggung jawab transendental yang mengoptimalkan pelaporan kinerja instansi.

H4: Tingkat religiusitas memoderasi hubungan antara SAP dengan AKIP.

H5: Religiusitas Memoderasi Hubungan Antara PI dengan AKIP

Temuan Nurhayati [7] juga mengonfirmasi bahwa tingkat religiusitas efektif memoderasi korelasi antara Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengendalian internal yang bersifat mekanis-struktural akan berjalan lebih optimal ketika didukung oleh instrumen pengendalian internal spiritual pegawai (self-control berbasis agama). Tingginya nilai-nilai kesadaran moral keagamaan memperkuat kepatuhan terhadap prosedur pengawasan, meminimalkan niat fraud, dan secara signifikan memperkuat efektivitas pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

H5: Tingkat religiusitas memoderasi hubungan antara PI dengan AKIP.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individual yaitu pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Aceh Barat. Tahapan yang dilalui dalam penelitian, pembangunan konsep, atau penyelesaian kasus, dituliskan pada bagian metodologi. Populasi penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Barat yang terdiri dari 65 SKPK. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan secara purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sehingga dapat mendukung penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada masing-masing 30 SKPK, yaitu untuk masing-masing SKPK diambil sampel sebanyak 2 responden. Maka sampel berjumlah 60 responden.

Tabel 1. Sampel

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	2 orang
2	Sekretariat DPRK	2 orang
3	Sekretariat Baitul Mal	2 orang
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2 orang
5	Dinas Kesehatan	2 orang
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 orang
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2 orang
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	2 orang
9	Dinas Sosial	2 orang
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2 orang
11	Dinas Syariat Islam	2 orang
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	2 orang
13	Dinas Pangan	2 orang
14	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2 orang
15	Dinas Lingkungan Hidup	2 orang
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 orang
17	Dinas Perhubungan	2 orang
18	Dinas Perdagangan	2 orang
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 orang
20	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	2 orang

*Pengaruh SAP dan PI Terhadap AKIP dengan Tingkat Religiusitas sebagai Variabel Moderasi
(Rahmi Juanda)*

21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 orang
22	Dinas perkebunan Dan Peternakan	2 orang
23	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	2 orang
24	Dinas Pendidikan Dayah	2 orang
25	Dinas Pertanahan	2 orang
26	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2 orang
27	Dinas Kepegawaian Dan PSDM	2 orang
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 orang
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 orang
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 orang
Jumlah Sampel		60 orang

3.2 Variabel dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh SAP dan PI terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan tingkat religiusitas sebagai variabel moderasi, dengan menggunakan teori keagenan sebagai landasan teoritis. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh SAP dan PI terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan tingkat religiusitas sebagai variabel moderasi, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei adalah pilihan yang tepat. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jawaban responden. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel independen terdiri dari SAP dan PI

3.3 Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$. Teknis pengolahan data mengombinasikan analisis kuantitatif untuk mengevaluasi parameter statistik. Formulasi matematika menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda untuk mengukur pengaruh multi-variabel prediktor (SAP dan PI) terhadap variabel terikat (AKIP). Model pengujian dikembangkan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mendeteksi peran interaksi variabel religiusitas. Pengujian instrumen wajib melewati tahapan Uji Validitas (korelasi Product Moment dengan $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,2632) dan Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha $> 0,60$). Selanjutnya, dilakukan Uji Asumsi Klasik yang mencakup Uji Normalitas (analisis grafik histogram dan Normal P-Plot), Uji Multikolinearitas (nilai Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10), serta Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser (nilai signifikansi residual $> 0,05$). Pengujian hipotesis akhir dibuktikan lewat Uji Parsial (Uji-t), Uji Simultan (Uji-F), serta evaluasi Koefisien Determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden, sedangkan standar deviasi menunjukkan tingkat variasi jawaban responden terhadap masing-masing variabel.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

		Statistics			
		SAP	PI	AKIP	Religiusitas
N	Valid	56	56	56	56
	Missing	0	0	0	0
Mean		48.93	3.66	52.79	53.75
Std. Deviation		4.306	1.049	4.713	3.497
Minimum		42	1	41	43
Maximum		59	5	60	60

Sumber : Output SPSS (2026)

Statistik deskriptif terdiri dari mean, Std deviation, minimum dan maximum disajikan dalam tabel 2. Nilai standar deviasi pada ketiga variabel lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif homogen dan variasi jawaban tidak terlalu besar. Selain itu, nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan standar deviasi mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap SAP, PI dan AKIP cenderung baik.

4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,22436687
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,058
	Negative	-,062
Kolmogorov-Smirnov Z		,466
Asymp. Sig. (2-tailed)		,982
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa jumlah sampel (N) sebesar 56 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,482. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain itu, nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,466, mendukung bahwa distribusi data tidak menyimpang dari normalitas atau dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau indepenen. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value, Ghazali (2016). atas dari tolerance value adalah $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 .

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas		
Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Standar Akuntansi Pemerintah	,796	1,257
Pengendalian Internal	,751	1,331
Religiusitas	,797	1,255

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel Coefficients, diketahui bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,796 dan VIF sebesar 1,257, variabel pengendalian internal memiliki nilai Tolerance sebesar 0,751 dan VIF sebesar 1,331, serta variabel religiusitas memiliki nilai Tolerance sebesar 0,797 dan VIF sebesar 1,255. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai Tolerance

yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grafik dimana sumbu X dan Y telah diproduksi.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,496	,302		1,644	,106
Standar Akuntansi Pemerintah	-,114	,054	-,316	-1,103	,140
Pengendalian Internal	,040	,056	,137	,713	,479
Religiusitas	,032	,088	,057	,366	,716
Interaksi Standar Akuntansi Pemerintah dan Religiusitas	-,003	,034	-,041	-,078	,939
Interaksi Pengendalian Internal dan Religiusitas	-,008	,030	-,136	-,256	,799

a. Dependent Variable: Abs Res

Sumber : Output SPSS (2026)

Karena seluruh nilai signifikansi tersebut > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual pada model penelitian bersifat homogen atau konstan.

4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas, yang terdiri dari SAP (X1) dan Pengendalian Internal (X2) terhadap AKIP (Y). Adapun model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,776	,391		1,985,052	
Standar Akuntansi Pemerintah	,483	,098	,447	4,922,000	
Pengendalian Internal	,439	,080	,502	5,517,000	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sumber: Ouput SPSS (2026)

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,776, yang berarti apabila variabel SAP (X1) dan PI (X2) dianggap konstan, maka nilai AKIP (Y) sebesar 0,776. Koefisien regresi SAP sebesar 0,483 dan PI 0,439, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan AKIP sebesar nilai koefisiennya dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, kedua variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap AKIP.

4.6 Hasil Uji t (Parsial)

Uji t (t-test) adalah pengujian koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,776	,391		1,985	,052
	Standar Akuntansi Pemerintah	,483	,098	,447	4,922	,000
	Pengendalian Internal	,439	,080	,502	5,517	,000
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan						

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sumber: Output SPSS (2026)

4.6.1 Pengaruh SAP Terhadap AKIP

Variabel standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai t-hitung standar akuntansi pemerintahan (X1) sebesar 4,922 lebih besar dari t-tabel 1,6735 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis pertama diterima, yang berarti standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.6.2 Pengaruh PI Terhadap AKIP

Variabel pengendalian internal memiliki nilai t-hitung pengendalian internal (X2) sebesar 5,517 juga lebih besar dari t-tabel 1,6735 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis kedua diterima, yang berarti pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.7 Uji f (simultan)

Uji F adalah pengujian koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau degree freedom.

Tabel 8. Hasil Uji f

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,279	2	2,640	46,185	,000 ^b
	Residual	3,029	53	,057		
	Total	8,308	55			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan						
b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah						

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah

Sumber: Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 46,185 yang lebih besar dari F-tabel sebesar 4,023 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Barat. Artinya, kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan dan memengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini. Karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis ketiga diterima (H3 diterima), yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan (X1) dan pengendalian internal (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

4.8 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seberapa besar persentase variasi variabel bebas (independen) pada model regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Dengan kata lain pengujian model menggunakan R², dapat menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model regresi linear berganda adalah variabel variabel independen yang

mampu mewakili keseluruhan dari variabel-variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependen, kemudian Besarnya pengaruh ditunjukkan dalam bentuk persentase.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,797 ^a	,635	,622	,2391

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah

Sumber: Ouput SPSS (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel Model Summary, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,622 menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal mampu menjelaskan variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 62,2%, sedangkan sisanya sebesar 37,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.9 Uji MRA

Penelitian ini juga diajukan hipotesis yang berkaitan dengan peran variabel moderasi, yaitu tingkat religiusitas (Z), terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis ini diuji menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan melihat pengaruh variabel interaksi antara X1Z dan X2Z terhadap variabel dependen. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \varepsilon$

Tabel 10. Hasil Uji MRA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,361	,351		10,128	,000
1					
Interaksi Standar Akuntansi Pemerintah dan Religiusitas	,237	,067	,606	3,153	,005
Interaksi Pengendalian Internal dan Religiusitas	,114	,081	,403	2,161	,012

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sumber : Outpus SPSS (2026)

4.9.1 Tingkat Religiusitas Memoderasi Hubungan Antara SAP dengan AKIP

Variabel interaksi antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Religiusitas (X1*Z) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,153 yang lebih besar dari t-tabel 1,6735 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Y). Karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis keempat (H4) diterima, yang berarti religiusitas mampu memoderasi hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

4.9.2 Tingkat Religiusitas Memoderasi Hubungan Antara PI dengan AKIP

Variabel interaksi antara Pengendalian Internal dan Religiusitas (X2*Z) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,161 yang lebih besar dari t-tabel 1,6735 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi Pengendalian Internal dan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Y). Karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis kelima (H5) diterima, yang berarti religiusitas mampu memoderasi hubungan antara Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, tingkat religiusitas terbukti mampu memoderasi hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal yang didukung oleh tingginya religiusitas aparatur dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan terus meningkatkan kualitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menumbuhkan nilai-nilai religiusitas aparatur guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Pada kesimpulan dibuat paragraf. Tidak diperkenankan membuat sub poin didalam kesimpulan dan saran. Template ini dibuat untuk konsistensi format artikel yang diterbitkan oleh Jurnal pada lembaga kami. Kerjasama dan kesediaan penulis mengikuti acuan penulisan sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad Agung Saputra dan Novita, “Pengendalian Internal dan Sistem Kompensasi,” *Uwais Inspirasi Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 197–210, 2023.
- [2] Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat, 2016.
- [3] H. K. Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” *J. Ekon. Bisnis, Manaj. dan Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 1073–1082, 2024, doi: 10.47709/jebma.v4i2.4014.
- [4] Yulizar, *Dimensi Religiusitas dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Sosial Umat*. Alfabeta, 2023.
- [5] I. Noormansyah and H. Arkeda Sirkomba, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Asn, Dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 2, pp. 618–627, 2022.
- [6] G. H. Putra and V. A. Fitri, “Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, pp. 4255–4268, 2024.
- [7] S. Nurhayati, “Pengaruh SAP, Kompetensi SDM, SPI, Audit Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris SKPD Kota Salatiga),” pp. 1–152, 2021.